



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3810361  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 228/SEK/KU.01/5/2012  
Hal : Surat Kesanggupan Membayar (SKM)  
Untuk Pihak Ketiga/Rekanan

7 MEI 2012

Kepada:

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Para Sekretaris Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia

Di -

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi kelengkapan berkas penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Nomor: 23/SEK/01/I/2012, tanggal 20 Januari 2012 tentang Laporan Kerugian Negara, dengan ini diberitahukan bahwa apabila dilingkungan kerja Saudara terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh Pihak Ketiga/Rekanan, agar segera membuat Surat Kesanggupan Membayar (SKM) sebagaimana contoh terlampir, dan harus menyetorkan/melunasi jumlah kerugian negara tersebut paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender ke kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423922-Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara, serta mengirimkan fotocopy Surat Kesanggupan Membayar (SKM) tersebut beserta Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (berkas asli diarsip oleh Satuan Kerja), atau di fax ke nomor : (021) 3446947.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

*[Handwritten Signature]*  
NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

# KOP SURAT PERUSAHAAN

## SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK – RI) Nomor ..... tanggal ..... perihal ..... dan Laporan Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK – RI) atas penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ....., tanggal ..... perihal ..... yang menyatakan telah terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp. ....,- (.....) oleh Pihak Ke III pada Pengadilan ..... yang disebabkan oleh ....., maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
NPWP : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp / Fax : .....

menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa :

1. Saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp. ....,- (.....) ;
2. Jumlah Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkannya ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423922 – Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara, dalam jangka waktu 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal dibuat dan ditanda tangannya Surat Kesanggupan Membayar ini ;
3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan saya lalai dalam mengganti seluruh jumlah Kerugian Negara tersebut, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
4. Demikianlah Surat Kesanggupan Membayar ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditanda tangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan .....

TANDA TANGAN  
+  
STEMPEL PENGADILAN

.....  
NIP.

Pejabat Pembuat  
Komitmen pada Tahun  
Kontrak Pekerjaan

TANDA TANGAN DIATAS  
MATERAI Rp. 6.000,-  
+  
STEMPEL PERUSAHAAN

.....

Saksi :

1. Panitera/Sekretaris Pengadilan .....
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan .....
3. Bendahara Penerimaan Pengadilan .....

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.